



Penataan Kawasan Malioboro Perlu Komitmen Bersama

Pedagang Kaki Lima Naik Kelas, Beri Jaminan Kepastian Legalitas



PEMDA DIY sangat serius menyiapkan penataan kawasan Malioboro. Terutama menyangkut rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Malioboro. Ribuan PKL bakal menempati lokasi baru. Di bekas Hotel Indra dan eks Dinas Pariwisata DIY. Persis di utara gedung DPRD DIY.

"Banyak hal sudah kami siapkan. Baik sarana dan prasarannya," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) DIY Sri Nurkatsiwi dalam perbincangan di sela menghadiri pembukaan pameran Semangat Maju Gerak atau Semangat Bhakti Pertiwi SiBakul di Atrium Malioboro Jogja, akhir pekan lalu. ▶ *Baca Pedagang...* Hal 3

PRODUK UNGGULAN: Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkatsiwi (tiga dari kanan) ikut mencicipi bakpia dalam pameran Semangat Bhakti Pertiwi SiBakul di Malioboro. Pemda DIY memberikan atensi khusus terhadap perkembangan UMKM.



SRI NURKATSIWI

Pedagang Kaki Lima Naik Kelas, Beri Jaminan Kepastian Legalitas

Sambungan dari hal 1

Siwi, sapaan akrabnya, menegaskan Pemda DIY punya komitmen kuat memajukan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Termasuk pedagang kaki lima. Hanya saja, pembinaan dan pendampingan PKL kerap menghadapi terkendala. PKL merupakan sektor informal. Kendala yang dihadapi terkait faktor legalitas. PKL Malioboro tidak punya legalitas atas tempat usaha yang ditempati.

"Dengan direlokasi ke eks Hotel Indra, para PKL bukan saja naik kelas. Mereka juga punya kepastian sekaligus legalitas. Pemerintah memberikan jaminan itu," tegas birokrat lama berkarir di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY ini.

Tentang legalitas, Siwi menyebutkan pada PKL Malioboro tersebut bakal mendapatkan los-los. Pemerintah telah menyiapkan modul untuk pembagian lokasi berdagang mereka. Sebagai tanda mereka berhak menempati, setiap PKL menda-

patkan KBP atas los tersebut. "KBP adalah kartu bukti pedagang. Itu menjadi legalitas mereka," jelas pejabat yang berulang tahun setiap 6 Juni ini.

Dalam kesempatan itu, Siwi berharap para PKL Malioboro menyikapi relokasi itu sebagai bentuk perubahan ke arah yang lebih baik. Dia mengajak agar para pedagang di kawasan jantung Kota Jogja itu memelihara rasa percaya diri.

Membangun semangat dan optimisme. "Jangan pernah berpikir tidak laku. Di lokasi baru, sangat mungkin usahanya justru semakin berkembang dan lebih baik," tegas magister manajemen agribisnis ini.

Dikatakan, Pemda DIY terus akan memberikan pembinaan dan pendampingan. Dinas Koperasi dan UKM DIY merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang banyak bersinggungan dengan upaya pendampingan tersebut.

Sudah banyak agenda yang disiapkan Siwi dan jajarannya. Baginya, langkah itu menjadi bagian dari perjalanan yang harus di-

lewati. "Itu bagian dari kehidupan dan penghidupan," tegasnya.

Soal pendampingan, Siwi menyebutkan antara lain mendorong mendapatkan bantuan dari perbankan dan non perbankan. Di samping itu, ada pendampingan pemasaran. Di era digital ini diharapkan pemasaran para pedagang tidak lagi bersifat konvensional. "Kami punya pola pembinaan dengan SiBakul Jogja," ungkapnya. SiBakul Jogja merupakan akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

SiBakul Jogja merupakan pusat data koperasi dan UMKM DIY. Seluruh kegiatan pembinaan koperasi dan UMKM wajib terintegrasi dengan sistem data SiBakul Jogja. Diharapkan secara efektif mampu memandu koperasi dan UMKM menentukan langkah modernisasi cara pengelolaan dan memajukan lembaganya.

Kembali soal relokasi PKL Malioboro saat ini masih tahap pendataan. Upaya pendataan dilakukan demi memastikan jumlah PKL yang punya izin berjualan

di kawasan Malioboro. Nantinya hanya pedagang berizin yang mendapatkan tempat di tempat relokasi.

Data PKL Malioboro sekarang sekitar 1800-an. Ada kemungkinan jumlahnya bertambah seiring adanya PKL baru. Kebijakan relokasi tidak bakal merugikan PKL. Tujuan dari kebijakan itu dalam rangka memberikan rasa nyaman bagi para pelaku usaha dan pengunjung kawasan Malioboro.

Selain mendata, Pemda DIY juga menyiapkan berbagai strategi agar eks Bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY yang menjadi lokasi baru PKL Malioboro tetap menarik dikunjungi wisatawan. Dia yakin PKL tidak akan rugi. Ada skema yang matang tengah disiapkan.

Relokasi dilakukan pada Januari 2022. Siwi berharap para pedagang mulai menyiapkan diri pindah. Sebab, semua PKL Malioboro bakal pindah. "Relokasi ini butuh komitmen bersama. Tidak hanya pemerintah daerah. Tapi juga para pelaku usaha," ajak perempuan yang meniti karir PNS sejak 3 April 1999 ini. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
3. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 14 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005